

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi selama ini selalu menjadi persoalan yang tidak henti-hentinya menjadi bahasan publik. Hal ini adalah wajar mengingat tindak pidana korupsi berada dalam posisi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani *United Nations Convention Against Corruption, 2003*, sehingga diharapkan bersungguh - sungguh di dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Salah satu upaya melakukan pemberantasan korupsi adalah melalui jalur hukum pidana. Diharapkan dengan jalur hukum pidana maka orang menjadi takut melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu jalur hukum pidana diharapkan mampu memulihkan / mengembalikan kerugian keuangan negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama ini yang seringkali memberikan laporan tentang banyaknya uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola keuangan negara.

Dalam praktek peradilan perkara tindak pidana korupsi sering kali muncul pernyataan tentang adanya kerugian negara yang diakibatkan perbuatan terdakwa namun nilai kerugian negara tersebut disangkal terdakwa, sehingga terdakwa berharap peradilan membebaskannya. Di sisi lain BPK sebagai satu-satunya auditor eksternal menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaannya telah nyata ada kerugian negara yang diakibatkan perbuatan terdakwa.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka melalui penyusunan tesis ini diharapkan dapat menemukan kelemahan dalam peraturan hukumnya maupun penerapan hukumnya dalam peradilan pidana, sehubungan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Badan Pemeriksa Keuangan, Hasil Pemeriksaan, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

The criminal act of corruption has always been a matter of ceaseless public discussion. This is reasonable considering that the criminal act of corruption is classified as an extraordinary crime.

Indonesia is one of the countries that signed the United Nations Convention against Corruption in 2003. Therefore, Indonesia is expected to be serious about eradicating the criminal act of corruption.

One of the efforts to eradicate corruption is using criminal law. It is expected that with by having criminal law, people will become afraid to commit criminal acts corruption. In addition, the criminal law is expected to be able to recover/restore the country's financial loss caused by the perpetrator of the criminal offense of corruption.

Up to this point, the Supreme Audit Agency (BPK) reported about the country's financial loss that cannot be accounted for by the Indonesia finance department.

In the practice the juridical of corruption cases, it is often found a statement about the state losses caused by the defendant's actions. However, the financial loss of the state is denied by the defendant, and the defendant expects the court to release him/her. On the other hand, the Supreme Audit Agency (BPK), as the sole external auditor stated that based on the inspection result, there has been a real loss of the state caused by the defendant's actions.

With respect to the problem, through the preparation of this thesis, the writer expects to be able to find a weakness in the legal regulations as well as its legal application of the law in criminal justice, in relation to eradicating of corruption efforts.

Keywords : Supreme Audit Agency (BPK), Result of the examination, The criminal act of corruption